



EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022 Halm 6325 - 6335

Research & Learning in Education

<https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>



Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Ali Askan^{1✉}, Agung Slamet Kusmanto²

Universitas Muria Kudus, Indonesia^{1,2}

E-mail: aliaskanyes@gmail.com¹, agungs@umk.ac.id²

Abstrak

Permasalahannya adalah Komite sekolah kurang maksimal dalam peranannya terkait proses penyelenggaraan pendidikan sekolahserta implementasi manajemen berbasis sekolah atau disebut dengan MBS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komite sekolah dalam penerapan manajemen sekolah. Metode penelitian eksploratori Metode pengumpulan data studi pustaka dengan analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran komite dalam membentuk manajemen sekolah (MBS) adalah sebagai (1) badan pertimbangan (*advisory agency*) (2) badan pendukung (*supporting agency*), dan; (3) badan pengontrol (*controlling agency*). Kesimpulannya adalah Komite sekolah mempunyai peran penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah.

Kata Kunci: Komite Sekolah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Abstract

The problem is that the school committee is not optimal in its role related to the process of providing education and implementing school-based management. The purpose of this study is to describe the school committee in the implementation of school management. Exploratory research method Method of collecting data is literature study. with descriptive data analysis. The results of the research on the role of school committees in the implementation of school-based management (SBM) are as (1) advisory agency (2) supporting agency, and; (3) controlling agency. The conclusion is that the school committee has an important role in the implementation of school-based management.

Keywords: School Committee, School Based Management (MBS).

Copyright (c) 2022 Ali Askan, Agung Slamet Kusmanto

✉Corresponding author

Email : aliaskanyes@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3556>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Pendidikan yang dianggap baik tidak hanya akan melibatkan input secara fisik seperti pada ruang kelas, guru dan pada buku teks tetapi juga pada pengajaran dan aspek pembelajaran yang lebih baik. (Iqbal, Papat, & Rahman, 2019). Pendidikan selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan negara. Pendidikan merupakan sarana untuk menerjemahkan suatu amanat ke dalam konstitusi nasional dan sarana untuk membangun karakter bangsa. Oleh karena itu, pemerintah akan mengubah dan memperbaiki pengelolaan pendidikan dari asas sentralisasi menjadi asas desentralisasi. Penerapan asas desentralisasi pada manajemen pendidikan akan menghadirkan sekolah sebagai salah satu lembaga yang akan memiliki hak otoritas dan kewenangan yang tidak akan lagi tergantung kepada suatu kebijakan dan adanya birokrasi pemerintah. Dengan konsep asas desentralisasi, pihak sekolah memiliki nilai kemandirian untuk dapat mengelola lembaganya melalui suatu manajemen basis sekolah (MBS).

Manajemen berbasis sekolah adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut mengharuskan sekolah untuk langsung memimpin penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana dikemukakan (Berlian, 2013) manajemen sekolah adalah suatu bentuk penyelenggaraan atau pengelolaan sekolah yang akan dipercayakan sepenuhnya kepada sekolah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat tercapai, sesuai dengan ketentuan undang-undang pendidikan yang berlaku saat ini. Munculnya masalah manajemen sekolah didorong oleh tidak adanya sistem pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Menurut (Athiyah, 2019) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat dipahami sebagai model model manajemen yang memberikan pemberdayaan yang lebih besar kepada sekolah dan akan mendorong partisipasi langsung masyarakat di sekolah (guru) siswa, kepala sekolah, staf.) dan masyarakat (orang tua, tokoh masyarakat) agar mutu sekolah dapat ditingkatkan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tentang keberadaan administrasi sekolah akan dilaksanakan jika ada konteks di mana keberadaan kebijakan tersebut dapat dibentuk. Atas dasar penjelasan terkait keberadaan manajemen pendidikan, manajemen pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan yang ada dalam lembaga pendidikan. (Anwar, 2018) Jika pengelolaan suatu lembaga pendidikan baik, maka pasti lembaga pendidikan itu akan bermutu dan bermutu. Upaya perbaikan pengelolaan lembaga pendidikan telah melahirkan suatu konsep yang dikenal sebagai manajemen sekolah, yang memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan semua guru dalam hal administrasi pendidikan dan pengajaran, dengan perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian. serta semua sumber daya pendidikan.

Sejalan dengan semangat dan Upaya reformasi pendidikan nasional melalui Manajemen Sekolah, hubungan antara sekolah, keluarga dan masyarakat juga telah direformasi sehingga pendidikan tidak hanya diberlakukan di sekolah dengan masa pembentukan perkumpulan. orang tua siswa dan masyarakat di bidang pendidikan (Pasaribu, 2017). Komite sekolah telah dibentuk sebagai bagian dari pelaksanaan MBS, yang akan memiliki kewenangan untuk dapat mengatur diri sendiri. Pengelolaan sekolah ini akan dilakukan dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel, artinya dalam hal pengelolaan sekolah adalah Direksi, khususnya Kepala Sekolah bekerjasama dengan masyarakat. (Marni & Samino, 2015).

Menurut (Nuzula, 2019) Keberadaan Komite Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat bersama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 berkaitan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Amanat rakyat ini merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah, yang mengidentifikasi pemerintah kabupaten/kota sebagai otoritas dan tanggung jawab pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang ada di daerah tidak hanya dipercayakan kepada pemerintah kabupaten/kota, tetapi dalam beberapa hal juga kepada satuan pendidikan, baik pada jenjang karir sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan sekolah, orang tua dan masyarakat atau pendidikan. Pihak terkaithal ini sesuai dengan

konsep partisipasi masyarakat dan manajemen sekolah, yang tidak hanya menjadi wacana, tetapi sudah mulai diterapkan di Indonesia. (Zulfadli, 2014).

Permasalahan berdasarkan hasil observasi di beberapa sekolah dasar di kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus menunjukkan peran komite sekolah yang tidak maksimal. Pemberdayaan komite sekolah yang kurang maksimal sehingga dalam bekerja tidak optimal. Komite sekolah hanya sebagai simbol saja dalam peranannya terkait proses penyelenggaraan pendidikan. Hal ini akan muncul karena kurangnya dari Orang tua secara aktif terlibat dalam menyediakan dana tambahan untuk pendapatan sekolah dan sering menyebabkan ketidaksepakatan antara ukuran kebutuhan sekolah dan kebijakan pemerintah.

Merujuk pada Permendikbud Edisi 54 2013, indikator terkait keunggulan kualitas lulusan di kalangan siswa, khususnya di sekolah dasar, dapat dilihat dari banyak perspektif, yaitu dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Misalnya, mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian nasional, fasih berbahasa asing, memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengintegrasikan pengetahuan untuk mengembangkan diri melalui proses praktik nonstop. Keterlibatan masyarakat dan keterlibatan orang tua sangat tinggi dalam hal; memantau kualitas sekolah, bertemu dengan orang tua siswa, membayar dan membentuk pembayaran uang sekolah bulanan dan mencairkan dana untuk kepentingan siswa baru (Adilah, 2021).

Dengan masalah ini, tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga pendidikan. Untuk dapat melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak termasuk keluarga, masyarakat dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai program pendidikan. Partisipasi ini perlu dan dikelola serta dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermanfaat bagi sekolah, terutama dalam hal peningkatan mutu kinerja pendidikan melalui suatu wadah yaitu Dinas Pendidikan Provinsi/Kota dan Komite Sekolah. satuan pendidikan. Dengan demikian, pelaksanaan manajemen sekolah di satuan sekolah akan dilakukan persis seperti yang diinginkan.

Penelitian tentang komite sekolah dalam perannya sebelumnya pernah diteliti oleh (Febriana, Isnaini, & Syarifuddin, 2019) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, peran dari komite sekolah di dalam meningkatkan dari mutu pendidikan di MAN 1 adalah 1) pertimbangan (*advisory agency*), 2) sebagai pendukung (*supporting agency*), 3) sebagai pengontrol (*controlling agency*), dan 4) sebagai mediator (*executive*). Penelitian (Radjak, 2015). dengan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran dari Komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen sekolah adalah 1) komite sekolah bertindak sebagai lembaga yang sengaja tidak berfungsi dengan baik, 2) komite sekolah hanya bertindak sebagai lembaga pendukung yang efektif di tingkat rendah; 3) peran dewan sekolah sebagai badan pengatur kurang baik, 4) peran dewan sekolah sebagai badan mediasi juga kurang baik.

Penelitian (Suharti, 2021) dalam penelitian menghasilkan penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa perwujudan peran Komite Madrasah dalam hal memberi pertimbangan pada penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tiga. Hasil menunjukkan adanya dukungan pemikiran, secara finansial, maupun tenaga di dalam penyelenggaraan pendidikan. Data yang diperoleh penulis menunjukkan peran Komite Madrasah sebagai alat dalam rangka aspek transparansi dan akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan peran Komite Madrasah sebagai sarana mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat, penulis juga menyimpulkan pelaksanaan peran komite yang belum maksimal. Hasil kemitraan antara komite sekolah dan sekolah belum mampu untuk mendorong tercapainya partisipasi aktif dari masyarakat. Secara umum, Komisi Madrasah belum mampu menjadi kekuatan yang signifikan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan masyarakat, sehingga belum dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan.

Kebaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas implementasi peran kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah dasar di kabupaten Kudus Kecamatan Kaliwungu, Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini layak untuk dilakukan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian ini dengan judul “Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang berarti penelitian yang bertujuan untuk mencari informasi tentang suatu topik atau pertanyaan yang belum atau belum sepenuhnya dipahami oleh peneliti. Penelitian eksploratif akan dilakukan ketika peneliti tidak memiliki data awal sehingga tidak mendapatkan gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti. Tinjauan pustaka terhadap beberapa konsep dan teori yang akan digunakan didasarkan pada literatur yang ada, terutama dari artikel-artikel yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka ini digunakan untuk mengembangkan konsep atau teori yang akan menjadi dasar kajian.

Metode penelitian pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua. Sementara data sekunder adalah segala sesuatu yang ditemukan dalam referensi, referensi cetak dan online akan membantu penelitian ini.

Analisis data menggunakan analisis konten (*Content Analysis*). Analisis isi (*Content Analysis*) akan digunakan untuk dapat menganalisis segala bentuk media, baik yang berasal dari surat kabar, berita radio, iklan televisi dan semua media dokumenter lainnya (Afifudin, 2012). Meskipun analisis data yang relevan dengan pembahasan merupakan salah satu upaya penulis untuk memudahkan pemahaman dengan menganalisis fakta melalui beberapa pendapat ahli, maka akan menyerap makna dan esensi dari pendapat para ahli tersebut, berhubungan dengan komite sekolah dan manajemen berbasis sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah organisasi independen yang mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas, ketidakterpencilan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan prasekolah, di sekolah, dan ekstrakurikuler. Berdasarkan penelitiannya (Kompri, 2014), Komite Sekolah/Madrasah adalah salah satu bentuk organisasi yang berupaya menggandeng, menyerap, serta menyuntikkan visi dan misi unsur-unsur dalam pendidikan yang terdapat di lingkup masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sekolah anak.

Dewan Sekolah / Mederasah adalah organisasi nirlaba didirikan atas dasar diskusi demokratis oleh pendidik tingkat sekolah untuk mewakili berbagai faktor yang tanggung jawab dalam memperkuat mutu alat dan ganjaran pendidikan, suatu kelompok atau lembaga. Dewan Pendidikan adalah nama badan di dalam unit. Di Penelitian (Danim, Sudarwan, & Khairil, 2012), Komite sekolah/medersah adalah sebuah organisasi independen, non-hirarkis serta anggotanya dengan tersusun berada di bawah mereka yang menduduki jabatan struktural di luarnya. Komite Sekolah/Madrasah merupakan pribadi yang otonom yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang dikembangkannya.

Pendidikan di dalam dan dilingkungan masyarakat, ataupun beberapa lembaga sekolah yang menyerupai dalam satu ruang lingkup. Komite dewan adalah umum. Ini adalah kondisi masing-masing lembaga, seperti nama lembaga itu adalah dewan sekolah, dewan sekolah, dewan sekolah ekstrakurikuler, dewan sekolah, dewan sekolah, dewan madrasah, komite TK, atau nama lain yang disepakati yang sesuai dengan kebutuhan.

Di sisi lain, pendapat (Mulyasa E., Manajemen Berbasis Sekolah, 2014) terbentuknya komite sekolah dengan beberapa tujuan :

1. Mempertimbangkan keterlibatan pendidik tingkat sekolah untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan sekolah dan praktik akuntabilitas yang berfokus pada kualitas layanan siswa secara tepat dan terbuka.
2. Mempertimbangkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam terlibat dalam tata kelola sekolah, tergantung pada peran dan fungsi pemangku kepentingan.
3. Mendorong berpartisipasi individual dan kerja sama sukarelawan dengan baik ataupun profesional dalam mendidik untuk meningkatkan kualitas anak dengan tepat dan profesional, disesuaikan dengan karakteristik anak.
4. Mendampingi serta berpartisipasi dalam sosialisasi dengan sekolah-sekolah untuk pihak yang berkepentingan serta berwenang di setingkat lokal.

Direksi di dalam dan di luar civitas akademika sekolah. Unit instruksional dari berbagai tingkat, jenis dan latar belakang ditemukan di lokasi yang sangat berbeda. Adapula sekolah terpisah/individu dan ada juga sekolah yang dikompleks. Adapula sekolah negeri dan swasta yang dikelola milik Yayasan Pendidikan.

Komite sekolah adalah organisasi independen dan tidak memiliki afiliasi hierarkis dengan sekolah atau lembaga lain. Sekolah dan komite sekolah memiliki kemandirian masing-masing, namun selalu menjadi hubungan dengan perlu bersinergi dalam semangat manajemen berbasis sekolah (MBS).

Fungsi dibentuknya komite sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran publik dan mengupayakan pendidikan berkualitas tinggi.
- b. Bekerjasama dengan masyarakat (individu/organisasi/dudi) dan pemerintah untuk mendidik dengan berkualitas tinggi.
- c. Mengkaji dan menganalisa aspirasi, gagasan, berbagai kebutuhan dan kebutuhan pendidikan yang dibawa oleh masyarakat.
- d. Selain itu, memberikan umpan balik, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, standar operasional satuan pendidikan, standar tenaga kependidikan, dan standar fisik, lembaga, dan masalah lain yang terkait dengan pendidikan.

Sedangkan perannya komite sekolah adalah:

- a. Pusat Saran untuk Mendefinisikan dan Menerapkan Kebijakan Pendidikan.
- b. Pertimbangan dalam menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan (*Advice Center*).
- c. Kelompok pendukung (*supporting agency*) berupa keuangan, pemikiran dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan belajar mengajar pada siswa.
- d. Pengelola (kewenangan administratif) untuk upaya transparans dan akuntabel dalam sebuah penyelenggaraan dan hasil di bidang pendidikan sekolah. Adanya mediator antara pemerintah dan masyarakat di bidang pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Basis Sekolah istilah disebut *School Based Management* merupakan rancangan tata usaha di periode kedaulatan massa menjelang memperteguh jenis pendidikan. Manajemen sekolah muncul di dunia pendidikan setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah, mempengaruhi pelaksanaan manajemen sekolah. Pada hakikatnya model MBS adalah manajemen yang memberdayakan sekolah dan mendorong sekolah untuk mengambil keputusan partisipatif dalam rangka mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. (Aziz, 2015).

(Pasaribu, 2017) menyatakan bahwa Manajemen sekolah berasal dari tiga kata yaitu manajemen, fasilitas dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan Anda. Basis memiliki akar kata atau kata dasar yang berarti basa. Sekolah adalah lembaga pembelajaran dan pendidikan, di mana mereka diajarkan dan diberikan. Anda dapat menafsirkan MBS

berdasarkan maknanya yang fleksibel dalam penggunaan sumber daya sekolah itu sendiri dalam proses belajar mengajar.

Menurut pendapat lain Sulistyorini dan Fathurrahman's Tilaar, manajemen pendidikan diartikan sebagai proses pengelolaan suatu lembaga melalui segala hal yang berkaitan dengan pengerahan sumber daya pendidikan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. (Sulistyorini & Fathurrohman, 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Th.2003 Pasal 51(1) sistem pendidikan nasional mengatur bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah didasarkan pada peningkatan standar penyelenggaraan pendidikan minimal sekolah. /madrasah. Prinsip dasar manajemen. Menurut penjelasan dalam Pasal 51 (1), manajemen sekolah/Madrasah adalah suatu bentuk otonomi penyelenggaraan pendidikan di lingkungan satuan pendidikan, dalam hal ini direktur dan guru dibimbing oleh dewan/pusat sekolah. akan didukung oleh mereka. Kegiatan pendidikan.

MBS, dalam pengertian yang sama diberikan oleh Myers dan Stonehill (1993), adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan yang penting dan pemerintah pusat dan daerah kepada masing-masing sekolah. (Pasaribu, 2017) Istilah manajemen sekolah merupakan terjemahan dari “manajemen sekolah”. Manajemen Berbasis Sekolah pertama muncul di Amerika Serikat. Masyarakat mulai mempertanyakan pentingnya pendidikan bagi kebutuhan pembangunan masyarakat. MBS merupakan model pendidikan baru yang lebih memberikan otonomi di tingkat sekolah (partisipasi masyarakat) dalam kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan kepada sekolah secara bebas untuk mengelola sumber daya dan dana, mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhannya, dan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk lebih memahami, mendukung, dan mengelola administrasi pendidikan. Pada saat yang sama, kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus dilaksanakan oleh sekolah. Sistem MBS mengharuskan sekolah untuk secara mandiri mencari, mengalokasikan, memprioritaskan, memantau, dan mempertanggungjawabkan sumber daya baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Tujuh Pilar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen sekolah didasarkan pada tujuh pilar: kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan staf siswa, sarana dan prasarana, pendanaan, hubungan sekolah dengan masyarakat, serta budaya sekolah dan lingkungannya. (Triwiyanto, 2015) Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mengelola kurikulum dan pembelajaran di sekolah.

Kurikulum sekolah dan manajemen pembelajaran adalah kurikulum dan pengaturan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum dan pembelajaran sekolah, berdasarkan prinsip-prinsip penerapan di sekolah.

2. Mengelola siswa di lingkungan sekolah

Maksud dari mengelola siswa merupakan aturan-aturan siswa yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan siswa di sekolah, berdasarkan factor-faktor penerapan manajemen berbasis sekolah.

3. Mengelola guru dan tenaga kependidikan di sekolah

Maksud dari mengelola guru dan tenaga kependidikan adalah penataan guru dan tenaga guru, perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan guru dan tenaga pendidik, berdasarkan prinsip-prinsip penerapan manajemen berbasis sekolah dan termasuk evaluasi.

4. Mengelola sarana dan prasarana sekolah

Mengelola sarana serta prasarana merupakan penempatan, termasuk perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan program sarana dan prasarana sekolah, berdasarkan prinsip atau faktor penerapan manajemen di sekolah.

5. Mengelola anggaran sekolah

Penggalangan dana merupakan pendanaan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi aktivitas kegiatan penggalangan dana di sekolah, berdasarkan prinsip atau faktor penerapan manajemen di sekolah.

6. Mengelola hubungan sekolah-masyarakat di lingkungan sekolah

Mengelola hubungan antara sekolah-masyarakat merupakan rancangan meliputi antara sekolah dengan masyarakat serta mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program hubungan sekolah-masyarakat berdasarkan prinsip atau faktor-faktor manajemen di sekolah.

7. Mengelola lingkungan dan budaya sekolah.

Mengelola kebudayaan dan lingkungan sekolah merupakan penataan kebudayaan serta lingkungan yang menjadi titik acuan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi aktivitas atau program kinerja kebudayaan serta lingkungan sekolah berdasarkan prinsip maupun faktor dalam melaksanakan manajemen sekolah.

Menurut (Kompri, 2014), dalam mengelola sekolah mencakup 12 hal seperti: 1) keragaman pola evaluasi guru, 2) pendekatan kinerja sistem kinerja, 3) otonomi manajemen sekolah, dan 4) guru yang optimal. Pemberdayaan, 5) Manajemen sekolah partisipatif. Kepala sekolah harus dapat mengikuti jalan mereka di seluruh komunitas sekolah sehingga setiap orang dapat memenuhi tanggung jawab mereka. 6) Sistem terpusat dikawasan pendanaan, 7) Sekolah berhak memilih sekolah/otonomi dalam mengambil berbagai keputusan, 8) Bekerjasama antara bisnis dengan pendidikan, 9) Sekolah memiliki akses yang relatif terbuka untuk pengembangan mandiri, 10) Penawaran yang kompetitif di sekolah, 11) sekolah yang efektif umumnya memiliki banyak karakteristik, 12) kontribusi untuk pendidikan sekolah.

Peran komite sekolah untuk melaksanakan manajemen sekolah

1. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Masyarakat yang berpartisipasi untuk lebih memahami kompleksitas pendidikan, dukungan dan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan, manajemen sekolah merubah sifat direksi, guru, serta staf manajemen untuk membuat mereka lebih dalam manajemen sekolah, kami ingin menjadi profesional dan administratif.

Manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk dalam kerangka otonomi tingkat sekolah yang luas, keterlibatan warga yang sangat kuat, serta kebijakan pendidikan pemerintah. Memberikan otonomi untuk memberikan kebebasan kepada sekolah untuk pengelolaan sumber daya manusia dengan mengelola dana sesuai dengan prioritas kebutuhannya dan menjadikan sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat atau warga. Masyarakat perlu berpartisipasi untuk lebih memahami, mendukung dan mengelola manajemen pendidikan.

Otonomi sekolah dapat diartikan sebagai kewenangan sekolah dalam memberi aturan serta mengendalikan prioritas masyarakat sesuai dengan atas prakarsanya sendiri, sesuai keinginan masyarakat sekolah dengan peraturan perundang-undangan. Konsep kemandirian harus didukung oleh seperangkat keterampilan: kemampuan untuk membuat keputusan terbaik, menghormati demokrasi/perbedaan pendapat, memobilisasi sumber daya, dan menjadi sarana terbaik dalam menjalankan pilihan, berarti ya. Kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan memecahkan masalah sekolah, kemampuan beradaptasi dan merencanakan ke depan, kemampuan menciptakan sinergi dan kolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan diri sendiri.

(Isnaini & Syarifuddin, 2019) menyatakan bahwa peran ikut serta masyarakat sangatlah utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu faktor *support* tercapainya pendidikan masyarakat. Serta juga dibuktikan bahwa manfaat pendidikan betul-betul dirasakan oleh warga masyarakat. Dewan Sekolah juga merupakan wadah bagi orangtua murid dan peminat pendidikan untuk meningkatkan mutu

pendidikan di sekolah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas belajar dan meningkatkan kesejahteraan semua guru.

Pengertian pengambilan keputusan partisipatif adalah cara pengambilan keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis yang mendorong keterlibatan langsung warga sekolah bagian dalam taktik pengumpulan pernyataan yang bisa berkontribusi dalam pencapaian sasaran sekolah. Hal ini berdasarkan menyakinkan bahwa jika masyarakat tersebut terlibat ikutserta/berpartisipasi dalam suatu putusan, orang tersebut mempunyai “kepemilikan” atas putusan dan bertanggung jawab penuh serta berkomitmen untuk mencapai tujuan sekolah.

2. Hubungan Masyarakat dan Sekolah dalam Wadah Komite Sekolah

Berdasarkan penelitiannya (Mulyasa E. , Manajemen Berbasis Sekolah, 2014) bahwa antara sekolah dengan masyarakat pada dasarnya ialah alat yang berperan sangatlah utama untuk memajukan serta dalam mengembangkannya pertumbuhan individu seorang siswa. Selanjutnya hubungan antara sekolah dengan masyarakat antara lain meliputi, meningkatkan mutu kualitas yang tinggi pembelajaran dan pertumbuhan seorang anak, memperkuat tujuan kedepannya, meningkatkan kualitas hidupnya dan penghidupan warga masyarakat, dan membantu masyarakat mengembangkan hubungan dengan sekolah.

Sekolah bukanlah peraturan yang terisolasi mulai sejak masyarakat. Sekolah adalah organisasi yang bekerja sama didalam konteks sosial. Sekolah menyambut siswa ke dalam masyarakat, sehingga kehadiran mereka tergantung pada dukungan sosial dan keuangan dari masyarakat. Oleh karena itu, koneksi kisi-kisi perguruan dan sipil mewujudkan bagian penting bagian dalam integritas sinopsis pengelolaan pendidikan.

Tentunya dengan hubungan sekolah-masyarakat yang terjalin harmonis yang bertempat di komite sekolah dapat mengoptimalkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kemajuan program pendidikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Orang tua dan masyarakat dapat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, dukungan keuangan, ide dan saran yang dibutuhkan sekolah.
- b. Orang tua menginformasikan kepada sekolah tentang potensi anak,
- c. Orang tua membuat rumah pendidikan untuk anak-anak mereka

Sinergi antara dewan sekolah dan sekolah menciptakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra dalam pendidikan. Diharapkan masyarakat dapat membimbing berbagai ide dan kontribusi untuk memajukan pendidikan di bidangnya masing-masing.

3. Peran Komite Sekolah dalam MBS

Peran Dewan Pendidikan dalam kaitannya dengan Permendiknas Nomer.44/U/2002 sebagai berikut. (a) Lembaga penasehat dalam penetapan serta pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pengajaran. (b) Baik lembaga yang memberikan dukungan keuangan, intelektual maupun manusia dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang pendidikan. (c) Pengawas terkait transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan di bidang pendidikan. (d) Mediator antara pemerintah dan masyarakat di bidang Pendidikan.

Peran masyarakat dalam pendidikan (sekolah) adalah sebagai berikut: Pemerintah kota berpartisipasi dalam pendirian dan pembiayaan di sekolah. b). Masyarakat yang berperan sebagai pengawas pendidikan supaya sekolah dapat terus memenuhi serta mendukung tujuan dan kebutuhannya. c) Organisasi yang terlibat dalam menyediakan fasilitas pengajar seperti seni teater, kebun binatang, gedung museum, dan perpustakaan. d). Lembaga menyediakan berbagai sumber daya untuk sekolah. Siswa dapat diikutsertakan ke sekolah untuk memberi informasi tentang permasalahan yang mereka pelajari. Ada banyak orang dalam masyarakat dengan kemampuan khusus. Petani, peternak, pedagang, polisi, dokter, dll. e). Komunitas adalah sumber belajar atau lab belajar. Selain buku pelajaran, kotamadya menawarkan banyak materi pembelajaran seperti sifat keindustrian, transportasi, perumahan, perkebunan, dan aspek industri pertambangan.

Menurut (Sulistyorini & Fathurrohman, 2014), “Pengelolaan suatu lembaga memerlukan keterlibatan langsung dari masyarakat, salah satu pemilik hak. Oleh karena itu, tujuannya didirikan lembaga tersebut adalah

memenuhi keinginan masyarakat. keinginan birokrat. Dalam konteks ini diperlukan struktur kelembagaan atau organisasi lembaga, termasuk peran serta masyarakat. Pelibatan masyarakat tidak hanya memberikan investasi pendidikan dalam bentuk deklarasi akhir, tetapi juga mencakup hal-hal yang terkait untuk perencanaan kurikulum pendidikan, evaluasi pendidikan, dan proses pembelajaran

Berikut 7 faktor manajemen sekolah yang dapat didelegasikan secara langsung sehingga masalah di bawah otoritas tingkat sekolah adalah:

- a. Tentukan visi dan misi, tujuan, strategi, logo, yel-yel, serta peraturan sekolah,
- b. Mempunyai kekuatan untuk menerima siswa-siswi baru, tergantung pada ruangan sekolah yang tersedia, fasilitas-fasilitas yang terpasang, jumlah guru yang mencukupi, serta staf administrasi yang mereka miliki,
- c. Menentukan program-program di sekolah serta ekstrakurikuler yang diselenggarakan sekolah,
- d. Penyediaan sarana maupun prasarana pendidikan sekolah, termasuk buku-buku modul, dapat tersedia di sekolah dengan memperhatikan standar dan peraturan yang berlaku,
- e. Pembuangan barang ataupun jasa dapat dilakukan oleh sekolah itu sendiri sesuai dengan pedoman peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah negara bagian dan kabupaten Kudus,
- f. Proses edukasi dan pembelajaran, ini adalah badan profesional lembaga yang sebenarnya,
- g. Masalah pendidikan berkelanjutan dalam pengertian konsep dari MPMBS adalah manajemen peningkatan mutu sekolah yaitu salah satu yang harus menjadi tanggung jawab dan kapasitas masing-masing di satuan pendidikan sekolah sejak awal.

(Kompri, 2014)(Kompri, 2014) menjelaskan dewan sekolah /madrasah adalah suatu bentuk lembaga yang menganut dan memperhatikan visi serta misi unsur-unsur pendidikan yang ada di masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan dari pelatihan manajemen adalah untuk (1) menanggapi upaya dan inisiatif masyarakat serta membimbing mereka dalam menetapkan kebijakan dan program operasi dalam industri pendidikan. (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan. (3) Menciptakan suasana serta kondisi transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai pendukung mutu sekolah kurang penting jika beroperasi di bawah peraturan yang efektif dan berfungsi secara optimal.

Penggunaan alokasi dana pendidikan lebih bertanggung jawab melalui pemberdayaan yang optimal dari Komite Sekolah, termasuk pemantauan penggunaan dana dan transparansi. Hal ini juga memungkinkan pendidikan yang lebih inovatif dengan lahirnya ide-ide kreatif yang hebat dari semua pemangku kepentingan pendidikan yang relevan.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Peran komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah sebagai (1) Badan penasihat untuk definisi dan implementasi kebijakan pendidikan di unit instruksional, dan (2) Lembaga bantuan berupa dana, gagasan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan pada suatu satuan pendidikan. (3) Kewenangan pengawas dari perspektif transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Komite Madrasah harus menjadi kekuatan penting dalam menerapkan manajemen pendidikan berbasis masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- 2013 *hubungan Gaya Belajar Dengan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas 5 Sdn 17 Kota Bengkulu* 30
(2010).
- Abdul Rouf Dan Lufita Raghda. (2018). Peranan Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jombang. *Sumbula* , 903-926.
- Adilah, H. G. (2021). Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu. *Jurnal Islamic Education Manajemen* , 87-94.
- Afifudin, E. (2012). Metodeologi Penelitian Kualitatif. (*Pustaka Setia : Bandung*) , 165.
- Ahmad, S. (2014). Problematika Kurikulum 2013 Dan Kepemimpinan Intruksional Kepala Sekolah. *Jurnal Pencerahan* , 98.
- Anwar, M. (2018). Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *Jurnal Ekspose* , 601-614.
- Ariani, N. F., S'dijah, C., Dan Subandi 2016 penerapan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Pada Materi Pecahan Sederhana Kelas Iii Sd Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016 Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Dalam Menghadapi Daya Saing Regional (Asean) 608-615
- Athiyah, C. N. (2019). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Alternatif Desentralisasi Pendidikan Di Man 4 Jakarta. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* , 130-145.
- Aziz, A. Z. (2015). Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam* , 69 - 92.
- Bahrudin Ardi, A. M. (2013). *Penerapan Metode Inkuiri Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Ipa Pada Siswa Kelas V Sdn 5 Mayonglor Kabupaten Jepara*. Universitas Negeri Semarang: Doctoral Dissertation.
- Berlian, I. (2013). Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi. *Jakarta : Erlangga* .
- Danim, Sudarwan, & Khairil. (2012). Profesi Kependidikan. *Bandung: Alfabeta* .
- Febriana, L., Isnaini, M., & Syarifuddin, A. (2019). Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Man 1 Palembang. *Jurnal Pai Raden Fatah* , 152-163.
- Iqbal, A., Papat, & Rahman, Y. (2019). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan* , 800-807.
- Isnaini, M., & Syarifuddin, A. (2019). Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan. *J U R N A L P A I R A D E N F A T A H* , 152-163.
- Joyce, B. C. (2009). *Model Of Teaching (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joyce, B., Calhoun, E., & Weil, M. (2009). *Model Of Teaching (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemendikbud. (2014). *Permendikbud No. 103 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kompri. (2014). Manajemen Sekolah Teori Dan Praktek. *Bandung: Alfabeta Cv* .
- Kristian, Y., & Chaerul, M. (2010). *Analisis Awal Implementasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu*.
- Lufita, A. R. (2018). Peranan Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jombang. *Sumbula* , 903-926.
- Madjid, A. (2014). *Pembelajaran Tematik Terpadu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marni, & Samino. (2015). Pemberdayaan Komite Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di Sd Bulukantil Surakarta. *Jurnal Edukasi Profesi Pendidik* , 15-25.

- 6335 *Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah – Ali Askan, Agung Slamet Kusmanto*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3556>
- Meinita, M. D. N., Marhaeni, B., Winanto, T., Jeong, G. T., Khan, M. N. A., & Hong, Y. K. (2013). Comparison Of Agarophytes (Gelidium, Gracilaria, And Gracilariopsis) As Potential Resources For Bioethanol Production. *Journal Of Applied Phycology* , 25(6), 1957-1961.
- Mulyasa. (2008). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Pt Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2014). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya .
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, N. (2016). Peningkatan Hasil Belajar Ipa Dengan Menerapkan Metode Inkuiri Siswa Kelas V Sd Negeri 68 Kec. Bacukiki Kota Parepare. *Publikasi Pendidikan* , 107-110.
- Nuzula, W. F. (2019). Peran Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Pena Islam* , 36–53.
- Pasaribu, A. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian. *Jurnal Edutech* , 12-34.
- Radjak, A. (2015). Peran Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di Smp Negeri 33 Makassar. (*Doctoral Dissertation, Ekonomi*) .
- Sanjaya. (2010). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suharti, I. (2021). Aktualisasi Peran Dan Fungsi Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sebagai Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran* , 153-169.
- Sulistiyorini, & Fathurrohman, M. (2014). Pengelolaan Lembaga Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam. *Esensi Manajemen Pendidikan Islam* , 11.
- Susanto, A. (2013). *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Triwiyanto, T. (2015). Tujuh Pilar Manajemen Berbasis Sekolah. *Edukasi Pendidikan* , 21.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Widyastuti, F. P. (2018). Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 Sd Melalui Model Pembelajaran Inquiry Learning. *Jurnal Kiprah* , 1-13.
- Zulfadli. (2014). Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan . *Jurnal Serambi Tarbawi* , 105-119.